

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah program negara-negara di dunia jangka panjang guna mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh setiap negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut TPB merupakan seruan universal untuk seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Program ini pertama kali dikenalkan ke permukaan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sejak memasuki tahun 2000 telah mencanangkan program MDGs untuk kurun waktu 2000 hingga 2015 yang kemudian pada tahun 2016 hingga tahun 2030, PBB kembali mencanangkan program TPB Diakses pada (The Assistance of the European Union, 2017) melalui laman <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>

Dalam dua puluh tahun terakhir, pembangunan yang mulanya ditujukan sebagai upaya pertumbuhan ekonomi sering kali tidak tepat dan justru menimbulkan dampak negatif. Hal ini lah yang mendorong dicanangkannya pembangunan berkelanjutan demi menyelaraskan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi paradigma baru untuk terus mewujudkan pertumbuhan ekonomi. TPB dinilai memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyusun kerangka kerja pembangunan berkelanjutan ini.

Demi tercapainya tujuan TPB dalam 2030, Pemerintah di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia bergerak mencapai target pekerjaan yang layak dengan upah dan kemampuan sumber daya manusia yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, India telah mulai target dengan menerapkan berbagai skema yang melekat pada TPB tujuan 8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi untuk melengkapinya melalui organisasi dalam tujuan strategis dengan pernyataan visi dan misi secara luas (Khaliq et al., 2021).

Indonesia bersama dengan 192 negara lainnya turut serta mengadopsi TPB sebagai program pembangunan berkelanjutan (Irhamisyah, 2019). Hal ini sebagai langkah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, melindungi kontinuitas keberlangsungan bumi, dan menjamin setiap insan agar merasakan peradaban kehidupan yang damai dan makmur pada tahun 2030. *TPB* mencakup 17 tujuan berdasarkan 169 target, mengatasi berbagai masalah yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan, seperti kemiskinan, pendidikan, perubahan iklim, kesehatan, keseimbangan ekonomi dan degradasi lingkungan (Izzo et al., 2020).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan cukup menjadi sorotan pemerintah Indonesia khusus di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beliau secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai salah satu bentuk kebijakan negara ini untuk

komitmen dan bertanggung jawab atas tujuan-tujuan TPB 2030. Dimana secara tidak langsung Perpres menjadi komando kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk turut aktif berpartisipasi langsung mencapai tujuan yang telah tertuang dalam TPB 2030 (Gusdwisari, 2020).

Pemerintahan Jokowi Ma'ruf menyatakan bahwa pembangunan akan terus berlanjut pada penguatan sumber daya manusia yang mana sejalan dengan perjanjian kesepekatan internasional untuk mendorong pembangunan yang menysasar pada kepentingan masyarakat secara global. Isu kemiskinan dan ketimpangan ekonomi adalah masalah utama yang selalu menjadi topik pembahasan bagi negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Hal ini yang menyebabkan pembangunan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi perhatian utama pada setiap rezim pemerintahan Indonesia (Hidayati et al., 2021). Program-program TPB menjadi krusial untuk segera diimplementasikan mengingat minimnya sumber daya, terbatasnya lapangan pekerjaan, momok inflasi dan berdampak langsung pada laju pertumbuhan perekonomian Indonesia yang masih di bawah 6% yang masih perlu usaha ekstra dalam merealisasikan berbagai macam program pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan peningkatan output dan pendapatan suatu negara secara nasional yang berkombinasi dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat diketahui melalui bertambahnya produksi barang industri, meningkatnya kualitas pendidikan, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya sektor jasa, serta bertambahnya produksi

barang modal. Dimana suatu negara akan berkomitmen untuk menaikkan dan memberikan hal yang terbaik untuk menunjang optimalnya pertumbuhan ekonomi negaranya. Tak terkecuali Indonesia, yang merupakan salah satu negara berkembang yang berupaya menaikkan pertumbuhan ekonominya agar terus meningkatnya kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat (Yasin, 2020)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi angka kemiskinan dan menghasilkan sumber daya manusia sebagai faktor utama penggerak pembangunan manusia yang mana pertumbuhan akan mengalami ekspansi jika ada pertumbuhan yang positif. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin pembangunan manusia. Selain pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam statistik PDB dan pendapatan per kapita, diperlukan adanya jaminan keamanan, tersedianya akses pendidikan dan layanan kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki dua sisi kesenjangan yang hasil pertumbuhan yang tinggi hanya

dirasakan oleh sebagian kelompok kecil sedangkan lemahnya tingkat pertumbuhan dirasakan oleh sebagian besar kelompok masyarakat. Kondisi tersebut sangat meprihatinkan yang secara langsung mencerminkan kesenjangan sudah dan cukup jauh untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara

Keberhasilan pembangunan suatu negara dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Pada data BPS menunjukkan (BPS, 2021b) tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 6,49 persen, 21,32 juta orang (10,32 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19 yang mana terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1,82 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (700 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,39 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (17,41 juta orang).

Pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, termasuk Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh wabah dunia yang berasal dari Wuhan, China yang dideteksi sejak akhir tahun 2019 yakni Virus SAR-Corona Virus Disease atau yang biasa disebut dengan Covid-19. Adanya wabah ini yang berhasil melanda hampir penjuruan negara di dunia membuat organisasi kesehatan dunia *World Healthy Organization* menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020

Organisasi kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan bahwa wabah *Coronavirus* sebagai pandemi global.

Perekonomian di Asia Pasifik akan mengalami penurunan yang akan lama dikarenakan penyebaran pandemi ini semakin luas menyebar diberbagai dunia. Negara yang terancam dalam jurang resesi akibat pandemi ini antara lain Negara Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Thailand. Pada tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi di China diprediksi mengalami penurunan menjadi 4,8%, yang mulanya 5,7%. Negara sector pariwisata seperti Hongkong, Singapura, Thailand dan Vietnam merupakan Negara penyumbang 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tentunya akan mengalami dampak perekonomian akibat pandemic ini. Sedangkan Direktur Bank Dunia memprediksikan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melemah dibawah 5% pada kuartal I-2020 (Yamali & Putri, 2020).

Di Indonesia, dua kasus pertama Covid-19 diumumkan pada 2 Maret 2020. Sejak itu, Covid-19 terus menyebar hingga ke seluruh provinsi (34 provinsi) dan 510 kabupaten/kota. Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo menjadi 2 provinsi yang terakhir melaporkan kasus positif Covid-19 (Kemenkeu, 2021). Indonesia darurat kesehatan dan berupaya menekan penyebaran Covid-19 melalui berbagai cara, dari mulai larangan transit dan menerima penerbangan Tiongkok, penerapan WFH sebagai implementasi *physical distancing*, karantina bahkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tak berhenti demikian, wajib tes Covid-19 agar menekan dan mendeteksi penyebaran wabah hingga sosialisasi vaksin dilakukan guna membentuk antibodi dan mempersiapkan kekebalan untuk melawan virus yang mematikan ini.

Total kasus kumulatif di Indonesia hingga 2 Juli 2021 mencapai 2.228.938 kasus, di antaranya 1.901.865 (83% total kasus) pasien telah dinyatakan sembuh dan 59.534 (3,4% total kasus) pasien meninggal dunia. Berdasarkan data per 2 Juli 2021, penyebaran (Kemenkeu, 2021). Covid-19 terkonsentrasi di 6 provinsi dengan jumlah kasus positif terbanyak, yaitu DKI Jakarta (25%), Jawa Barat (18%), Jawa Tengah (12%), Jawa Timur (8%), Kalimantan Timur (4%), dan Riau (3%) Covid-19 ini memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi yang berupa menurunnya tingkat perekonomian dunia khususnya Indonesia. Setiap hari angka kasus COVID-19 di Indonesia bertambah. Bertambahnya kasus tersebut menyebabkan pemerintah meberlakukan kebijakan baru, yang dikenal dengan PSBB dan PPKM. Hal ini yang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun, meningkatnya pemutusan hubungan kerja, rendahnya tingkat mobilitas masyarakat, turunnya daya beli dimana berdampak langsung terhadap pendapatan nasional Indonesia dan mengakibatkan, pertumbuhan ekonomi negara ini juga melemah (Indayani & Hartono, 2020).

Di samping itu, sektor yang cukup mengalami keprihatinan dan pukulan dahsyat adalah sektor pariwisata. Larang berpergian dan

travelling menjadi momok menakutkan yang merupakan konsekuensi kebijakan PPKM dan PSBB dalam implentasi *social distancing*. Dampaknya akan berpengaruh pada bisnis perhotelan, pusat wisata, restaurant, transportasi, dan retail yang biasanya bergantung pada adanya kunjungan turis lokal dan/atau turis manca negara. Sektor manufaktur juga terimbas karena terhambatnya *supply chain* bahan baku disebabkan kelangkaan bahan baku terutama dari China dan keterlambatan kedatangan bahan baku. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga produk dan memicu inflasi.

Isu inflasi yang akan menjadi permasalahan untuk menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadikan pemerintah Indonesia bergegas memperbaiki kebijakan fisak dan moneter untuk menghadapi *shock* Covid-19 dan pasca pandemi. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melakukan kebijakan *recofusing* kegiatan dan realokasi anggaran dimana disahkannya Inpers No.4 Tahun 2020 dengan tujuan seluruh lapisan pemangku kepentingan pemerintah bersinergi untuk mempercepat *recofusing* kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang dan jasa yang mana lagi-lagi tujuannya negara ini stabil dalam hal perekonomian dan tentunya bisa mencapai pada titik perdamaian dan kemakmuran manusia dimana selaras dengan pilar pembangunan ekonomi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Pengaruh

Pilar Pembangunan Ekonomi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Akuntansi Arus Dana di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh pengaruh pilar pembangunan ekonomi pada energi bersih dan terjangkau dalam TPB terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
2. Apakah pengaruh pengaruh pilar pembangunan ekonomi pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam TPB terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
3. Apakah pengaruh pengaruh pilar pembangunan ekonomi pada industry, inovasi, dan infrastruktur dalam TPB terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
4. Apakah pengaruh pengaruh pilar pembangunan ekonomi pada berkurangnya kesenjangan dalam TPB terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pilar pembangunan ekonomi pada energi bersih dan terjangkau dalam TPB terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pilar pembangunan ekonomi pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam TPB terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pilar pembangunan ekonomi pada industri, inovasi, dan infrastruktur dalam TPB terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pilar pembangunan ekonomi pada berkurangnya kesenjangan dalam TPB terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Operasional (Praktis)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi aktual mengenai penerapan Sustainable Development Goals pada era pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan, bahan evaluasi, rekomendasi, dan menjadi instrumen dalam membantu pengambilan kebijakan oleh pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan dan seluruh aspek yang memiliki kepentingan dan bersinergi untuk memperbaiki pertumbuhan perekonomian Indonesia dan bercita-cita menjadikan negeri ini mencapai titik perdamaian dan kemakmuran manusia.

2. Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (Akademis)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan baru tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya pada era pandemi Covid 19, menggenapi

penelitian-penelitian yang sejenis terdahulu dan dapat menjadi referensi dalam penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa mendatang.